

## **BAB I**

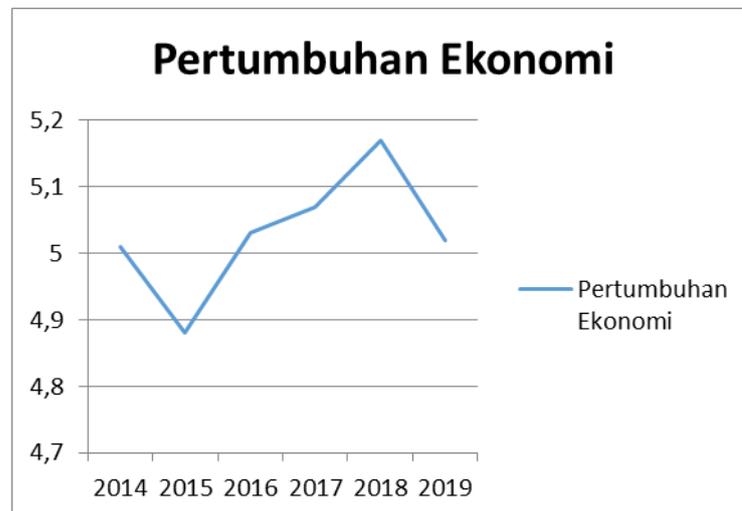
### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman, tentu kebutuhan manusia bertambah. Oleh karena itu ekonomi secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan. Menurut (Suwardjono, 2014) pertumbuhan memiliki definisi yang berbeda yaitu proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang, sedangkan perubahan yang secara umum terjadi pada perekonomian yang dialami suatu negara seperti kemiskinan, dimana masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan sebagai akibat berkurangnya pendapatan masyarakat sehingga mengalami penurunan daya beli barang kebutuhan pokok secara umum. Akibatnya masyarakat tidak dapat hidup secara layak, jika hal ini ditangani dengan tepat maka suatu negara mengalami keadaan ekonomi yang stabil sehingga mempengaruhi kesejahteraan kehidupan penduduk yang ada di negara tersebut.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan salah satu indikasi yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui tingkat produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan selama satu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia sering terkendala masalah modal dan investasi. Indonesia masih bergantung pada modal dari investasi pihak asing untuk menunjang kegiatan ekonominya.

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi tinggi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia termasuk dalam ekonomi besar di Asia Tenggara yang memiliki sejumlah karakteristik sehingga menempatkan negara ini mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Selain itu dalam beberapa tahun terakhir ada dukungan yang kuat dari pemerintah pusat untuk menekan ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas (mentah). Sekaligus meningkatkan peran industri manufaktur dalam perekonomian. Berikut ini grafik mengenai data pertumbuhan ekonomi di Indonesia.



Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

**Gambar 1.1 : Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2014-2019**

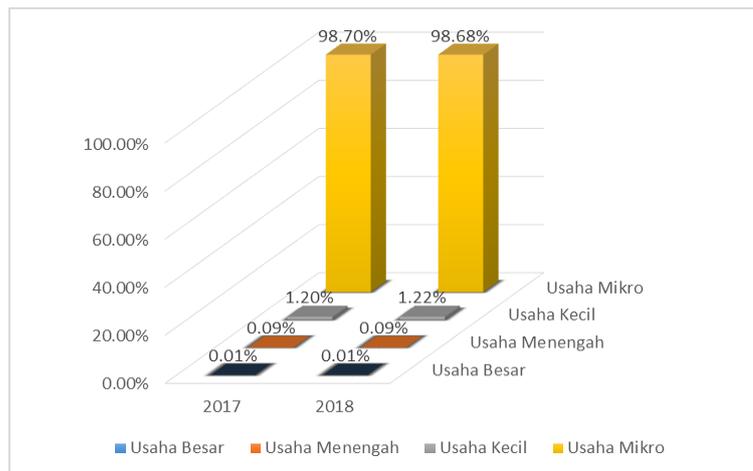
Berikut penjelasan mengenai grafik pertumbuhan ekonomi pada gambar 1.1 dari tahun 2014 hingga 2019. Pada tahun 2014 sebesar 5,01%, pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 4,88%, pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 5,03%, pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 5,07%, pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 5,17%, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 5,02%. Berdasarkan

grafik diatas, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 2014 hingga 2019 mengalami naik turun.

Peran UMKM di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dikutip dari *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*(2001) karya Tulus Tambunan. UMKM tidak hanya dirasakan di negara berkembang saja melainkan juga di negara maju sebab UMKM menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, kontribusi UMKM juga berperan terhadap pembentukan atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Secara umum terdapat tiga peran UMKM terhadap perekonomian di Indonesia yang meliputi sebagai sarana pemeratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, sarana mengentaskan kemiskinan, dan sarana pemasukan devisa bagi negara. Indonesia mempunyai berbagai macam jenis usaha, mulai dari jenis usaha penyediaan barang hingga jasa. Skala usaha tersebut juga beragam mulai dari skala kecil hingga besar. Jenis skala ini juga berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam literatur atau undang-undang yang berlaku. Salah satu jenis usaha yang ada di Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja (B. Indonesia, 2015). Terbukti dengan tidak berpengaruhnya UMKM terhadap krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia pada tahun 1997-1998, pada saat itu hanya UMKM yang tetap berdiri kokoh.

Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru mengalami peningkatan dan mampu menyerap 85 juta hingga 120 juta tenaga kerja sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2018 jumlah usaha di Indonesia

sebanyak 64.205.156 unit yang terdiri dari 63.350.222 unit usaha mikro, 783.132 unit usaha kecil, 60.702 unit usaha menengah dan 5.550 unit usaha besar. Perkembangan jumlah unit usaha dari Usaha Besar dan UMKM pada tahun 2017-2018 bisa terlihat pada gambar di bawah ini yang menunjukkan bahwa presentase terbesar ada pada UMKM yaitu 99,99% dan sisanya 0.01% untuk usaha besar. Berikut gambar yang dimaksud :



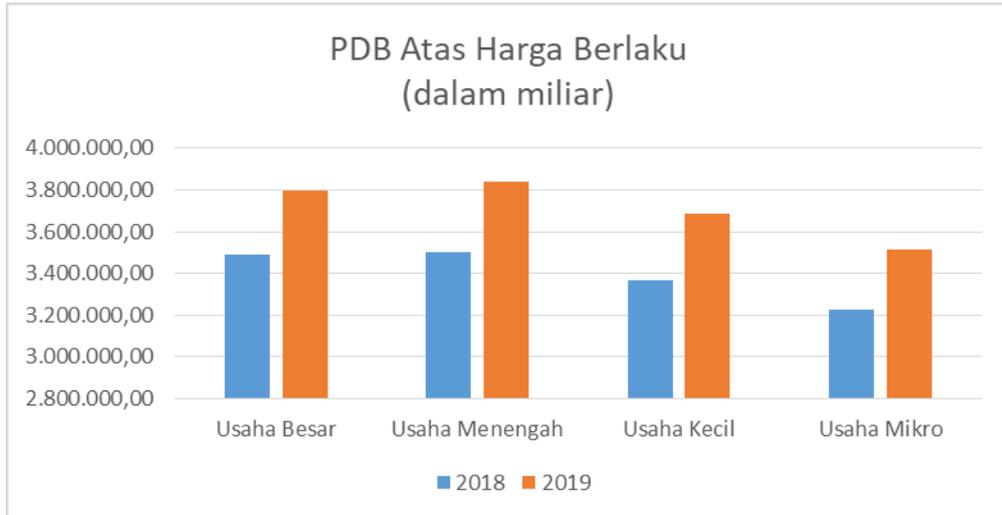
Sumber: Kemeterian Koperasi dan UMKM

**Gambar 1.2: Grafik Perkembangan Unit Usaha Besar dan UMKM Tahun 2017-2018**

Mayoritas usaha yang berskala kecil tidak terlalu bergantung pada permodalan yang besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing, sehingga ketika terjadi fluktuasi nilai tukar UMKM tidak terlalu berpotensi mengalami imbasnya. Hal ini juga menjadikan UMKM menjadi penyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) sekitar 60% dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pengertian PDB sendiri adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (B. Indonesia, 2015).

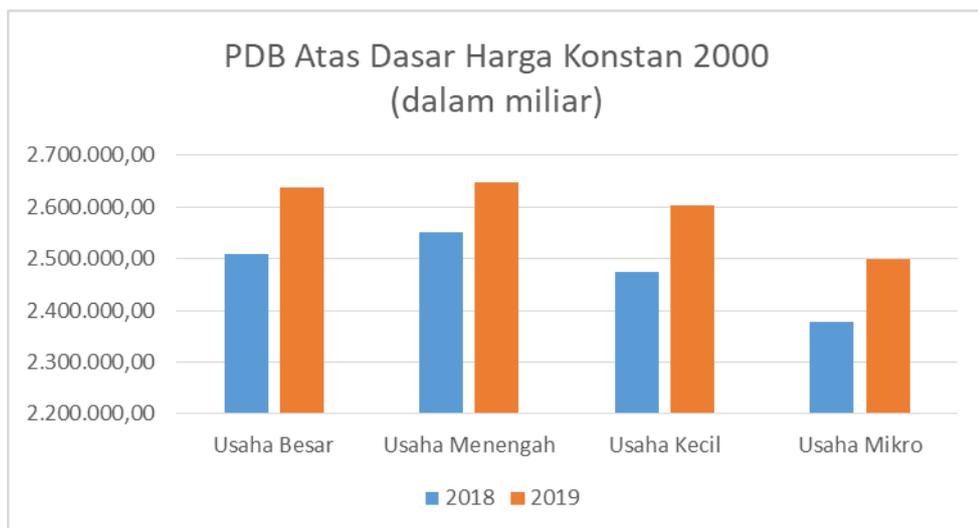
Grafik di bawah ini menjelaskan sumbangan UMKM terhadap PDB atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan. Kontribusi UMKM terhadap

PDB Nasional menurut Harga Berlaku pada tahun 2018 sebesar Rp 10.425,397,30 miliar, sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp 10.949.243,70 miliar. Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional menurut Harga Konstan pada tahun 2018 sebesar Rp 14.838.311,50 miliar, sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp 15.833.943,40 miliar.



Sumber: Kemeterian Koperasi dan UMKM

**Gambar 1.3: Grafik Perkembangan PDB Atas Dasar Harga Berlaku UMKM dan Usaha Besar Tahun 2018-2019**



Sumber: Kemeterian Koperasi dan UMKM

**Gambar 1.4: Grafik Perkembangan Jumlah PDB Atas Dasar Harga Konstan 2000 UMKM dan Usaha Besar Tahun 2018-2019**

Besarnya peran yang dimiliki oleh UMKM membuat pemerintah memberikan pengakuan terhadap keberadaan UMKM dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2018 tentang usaha, mikro, kecil dan menengah. Pemerintah juga memberikan bantuan dalam hal permodalan agar UMKM lebih mudah dalam mengembangkan usahanya, yaitu dengan memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Lembaga Keuangan atau Koperasi (Permenko No.11, 2017). KUR bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Penyaluran KUR dilakukan dengan dua metode, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Metode penyaluran langsung bisa dilakukan dengan datang langsung ke Lembaga Keuangan atau Koperasi. Salah satu syarat untuk pengajuan KUR adalah laporan keuangan ([www.bankbri.info](http://www.bankbri.info)). Laporan keuangan akan menjadi objek analisis bagi pihak Lembaga Keuangan (Bank) untuk mencairkan pembiayaan kepada calon nasabah. Pada kenyataannya hal tersebut menjadi kendala bagi UMKM, sebab UMKM belum mampu menyediakan informasi yang diperlukan. Saat ini banyak UMKM yang belum mampu menjalankan sistem akuntansi dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Penjelasan dari (Apriliani, 2015) bahwa pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh UMKM di Desa Tenganan, Kabupaten Karangasem masih sangat sederhana, hanya mencatat dan menyusun pemasukan dan pengeluaran berdasarkan nota dan tanggal transaksi. Pencatatan tersebut hanya untuk melihat kondisi usahanya mengalami kerugian atau mendapatkan keuntungan. Banyak pelaku UMKM yang menyadari

pentingnya catatan akuntansi dan laporan keuangan, tapi tidak sejalan dengan praktiknya.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) selaku penyusun standar akuntansi keuangan yang diakui di Indonesia sudah membuat standar akuntansi keuangan untuk mengatasi permasalahan di atas. Standar akuntansi dibuat untuk menyelaraskan atau untuk keseragaman laporan keuangan, memudahkan penyusunan laporan, dan untuk pengguna laporan keuangan. Salah satu standar akuntansi untuk UMKM, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK-EMKM). SAK-EMKM disahkan pada 24 Oktober 2016 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2018. Sebelumnya ada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)(I. A. Indonesia, 2002), namun banyak pemilik UMKM masih merasa kesulitan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK-ETAP. Maka dari itu DSAK IAI menerbitkan SAK-EMKM sebagai pengganti SAK-ETAP, formatnya lebih sederhana karena dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis dan pengakuan transaksi-transaksi sesuai dengan transaksi yang umumnya terjadi pada UMKM.

Selain kendala yang dijelaskan di atas, kendala lainnya yang dialami oleh pemilik UMKM adalah UMKM belum melakukan konsep entitas bisnis. Menurut (Rawun, 2019), konsep entitas bisnis adalah ketika entitas tersebut berdiri tersendiri sebagai suatu kesatuan yang terpisah. Konsep entitas bisnis tercermin dari pemisahan antara uang pribadi dengan uang usaha. Kendala lainnya yaitu minimnya sumber daya manusia (SDM) yang memahami tentang SAK-EMKM dan sosialisasi serta pengawasan dewan terkait implementasi SAK-EMKM. Kendala utama dalam penerapan SAK-EMKM adalah pengetahuan yang dimiliki pelaku UMKM masih sangat minim

terhadap standar akuntansi keuangan. Oleh karena itu harus ada perhatian lebih dari pihak pemerintah terkait dengan sosialisasi dan pelatihan serta pendampingan pelaku UMKM terhadap kesadaran akan pentingnya pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Salah satu daerah di Indonesia yang memerlukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan adalah Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Dari tahun ke tahun jumlah UMKM di Kabupaten Nganjuk terus bertambah, hal ini sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini (Nganjuk, 2020):

**Tabel 1.1: Jumlah UKM di Kabupaten Nganjuk Tahun 2017-2019**

No	Sektor	Tahun	Skala		Jumlah
			Usaha Menengah	Usaha Kecil	
1	Perdagangan	2017	1.322	11.890	13.212
	Industri Pertanian		511	2.876	3.387
	Industri Non Pertanian		185	1.050	1.235
	Aneka Usaha		532	2.998	3.530
	<b>Jumlah</b>		<b>2.550</b>	<b>18.814</b>	<b>21.364</b>
2	Perdagangan	2018	1.323	11.892	13.214
	Industri Pertanian		511	2.878	3.389
	Industri Non Pertanian		185	1.051	1.236
	Aneka Usaha		532	3.001	3.533
	<b>Jumlah</b>		<b>2.551</b>	<b>18.822</b>	<b>21.373</b>
3	Perdagangan	2019	1.323	11.895	13.217
	Industri Pertanian		511	2.878	3.389
	Industri Non Pertanian		185	1.051	1.236
	Aneka Usaha		533	3.003	3.536

	<b>Jumlah</b>		<b>2.552</b>	<b>18.827</b>	<b>21.379</b>
--	---------------	--	--------------	---------------	---------------

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk (2020)

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan jumlah UMKM pada setiap industri di skala usaha kecil dan usaha menengah yang ada di Kabupaten Nganjuk dari tahun 2017-2019, diantaranya ada sektor perdagangan, industri pertanian, industri non pertanian, dan aneka usaha. Hal ini cukup memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan juga sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi karena ada UMKM, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.2: Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2019**

<b>Kabupaten</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>				
	2019	2018	2017	2016	2015
Nganjuk	5,36	5,39	5,26	5,29	5,18

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk (2020)

Salah satu UMKM yang juga berperan dalam pertumbuhan laju ekonomi di Kabupaten Nganjuk adalah UD. Sugeng Mulyo. Usaha ini bergerak di bidang mebel dan berlokasi di desa Kwagean, kecamatan Loceret, kabupaten Nganjuk. Usaha ini masuk dalam kriteria usaha kecil. Usaha ini merupakan salah satu jenis usaha industri pengolahan dalam perabotan rumah tangga, karena sejatinya UMKM merupakan usaha yang menggerakkan sektor riil. UMKM lebih berfokus pada pengembangan industri rumah tangga dan mendorong faktor produksi dan konsumsi (Warsadi, 2017). Akan tetapi, sesuai dengan kendala yang dijelaskan di atas, pemilik UD. Sugeng Mulyo juga mengalami kendala, seperti belum ada laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-EMKM, belum ada pemisahan antara keuangan

pribadi dan usaha, serta pemisahan tugas untuk melakukan setiap transaksi atau kegiatan. Seluruh kegiatan produksi dan keuangan dikelola sendiri oleh pemilik UD. Sugeng Mulyo. Namun, UMKM ini sistem keuangannya sudah layak untuk disusun berdasarkan SAK-EMKM.

Selain berdasarkan kendala di atas, dari beberapa penelitian terdahulu juga masih terjadi perbedaan-perbedaan hasil penelitian mengenai penyusunan laporan keuangan UMKM yang sesuai dengan SAK-EMKM. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut. Salah satunya penelitian dari (Apriliani, 2015) yang menyatakan, bahwa penyusunan laporan keuangan oleh usaha Ata Shop masih mengalami kendala karena faktor sedikitnya SDM yang dipekerjakan bisa memahami penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-EMKM. Faktor lainnya disebabkan oleh tingkat kompetensi seperti keikutsertaan SDM yang menyusun laporan keuangan dalam pelatihan maupun seminar terkait, serta faktor lingkup organisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Natsir, 2019) menyatakan, bahwa pelaku usaha Antang belum memahami serta belum melakukan pencatatan dan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-EMKM. Kendala tersebut disebabkan oleh keterbatasan SDM yang memahami SAK-EMKM, sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa tidak pernah mendengar istilah tersebut dan lebih mengenal istilah akuntansi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dialami pelaku UMKM dan keterbatasan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) seperti di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini berjudul **“PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA UMKM BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN-ENTITAS MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (SAK-EMKM)” (STUDI KASUS PADA UD. SUGENG MULYO KABUPATEN NGANJUK)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana pencatatan keuangan dan penerapan SAK-EMKM di UMKM UD. Sugeng Mulyo Kabupaten Nganjuk ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencatatan keuangan dan penerapan SAK-EMKM di UMKM UD. Sugeng Mulyo Kabupaten Nganjuk.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan contoh bagi UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan hasil positif bagi pengembangan UMKM terutama dalam lingkup industri mebel di bidang akuntansi.

### **2. Manfaat praktis**

#### **a. Bagi penulis**

Penulis bisa mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama berada di bangku kuliah untuk terjun langsung di lingkungan kerja. Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan, pengalaman, serta pengetahuan penulis mengenai UMKM. Penulis juga dapat

mengetahui laporan keuangan yang lebih sederhana melalui pencatatan pada UMKM.

b. Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan bahan evaluasi bagi UMKM untuk pencatatan dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM sehingga dapat digunakan untuk menentukan kebijakan di periode selanjutnya. Selain itu penelitian ini digunakan untuk membantu penyusunan laporan keuangan UD. Sugeng Mulyo agar sesuai dengan SAK-EMKM, sehingga diharapkan untuk kedepannya pihak UD. Sugeng Mulyo dapat menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-EMKM.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi di perpustakaan Universitas Islam Majapahit guna menambah informasi mengenai UMKM khususnya di bidang akuntansi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penelitian yang akan datang oleh pihak peneliti lain.